

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini akan dikemukakan mengenai, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan pada bagian akhir sistematika penulisan penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

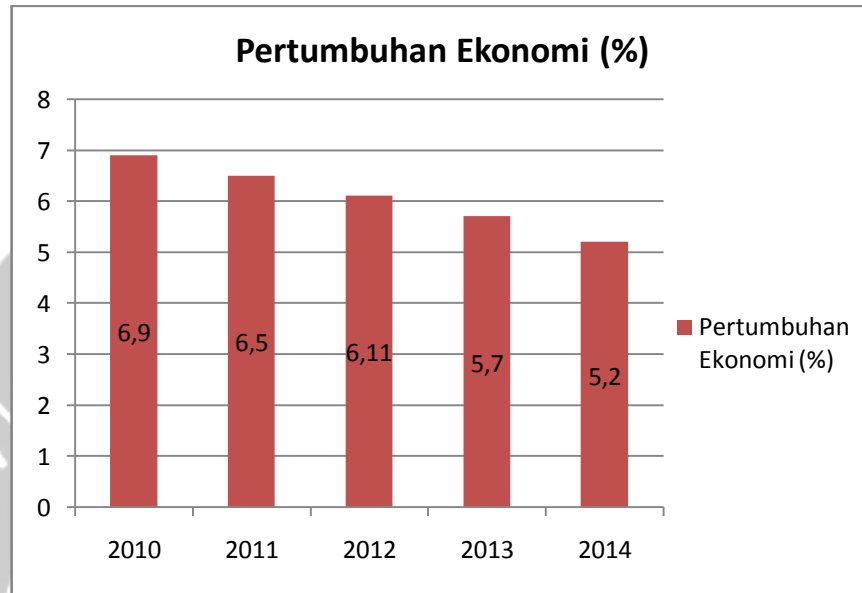
Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang, yang pada hakekatnya setiap negara ataupun daerah menginginkan adanya peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi disetiap tahunnya. Adanya pertumbuhan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Pada umumnya pembangunan di negara sedang berkembang memfokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi atau berkembang apabila dari satu periode ke periode berikutnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan terus meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya, akibat teknologi yang digunakan juga berkembang dari masa ke masa.

Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2000:101). Oleh karena itu identifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhinya termasuk peran pemerintah menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, ataulebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik, menjadi obyek penting untuk dianalisis dan diperdebatkan. Secara umum gambaran pengeluaran publik, yaitu infrastruktur fisik atau *human capital*, dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi keuangan khususnya pengeluaran dapat memperlambat pertumbuhan (*because of disincensive effect*) (Sodik, 2007: 64).

Pertumbuhan ekonomi biasanya berhubungan erat dengan kenaikan atau peningkatan produksi barang dan jasa, Pengukuran dalam perekonomian di suatu negara itu adalah produk domestik bruto (PDB). PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Sama halnya di daerah/provinsi pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB merupakan nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu (DIY Dalam Angka, 2000:527). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB atau PDRB yang digunakan berdasarkan harga konstan (PDB *Rill*/ PDRB *Rill*), sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan *rill* yang terjadi karena adanya pertambahan produksi

(Mankiw,2007). Berikut grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan PDB harga konstan periode tahun 2010-2014.



Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2014
 Sumber : statistik.tempo.com.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung menurun dari tahun 2010 mencapai 6,9% hingga 2014 5,2%, namun di beberapa daerah/provinsi pertumbuhannya justru cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu Provinsi yang pertumbuhannya cenderung meningkat yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dalam melaksanakan pembangunan daerahnya telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi yang sedang berkembang dan giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap tanpa mengabaikan pemerataan dan kestabilan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan wisata memiliki potensi yang tinggi sebagai daerah yang lebih maju. Hal ini dikarenakan sumberdaya yang dimiliki cukup strategis dan memiliki jumlah yang

melimpah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY, dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2000-2014

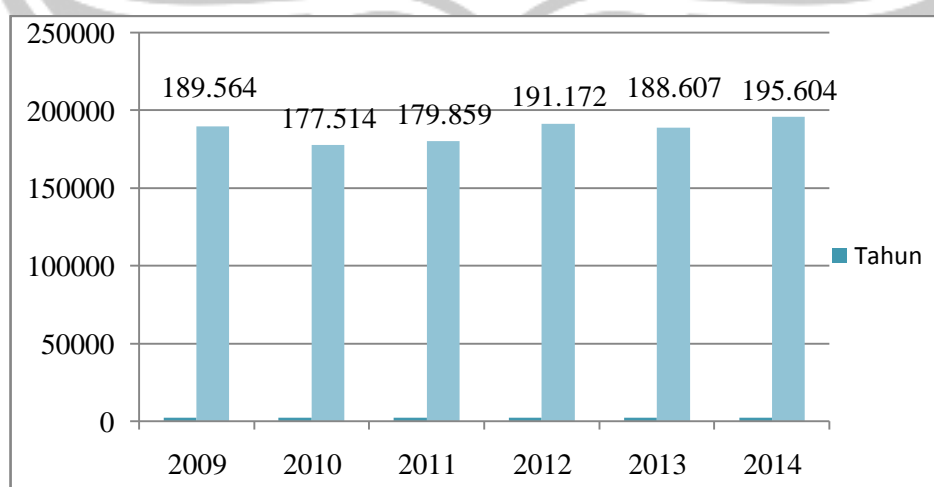
Tahun	Pertumbuhan ekonomi (%)
2000	4.01
2001	4.27
2002	4.50
2003	4.58
2004	5.12
2005	4.73
2006	3.69
2007	4.31
2008	5.03
2009	4.43
2010	4.88
2011	5.17
2012	5.32
2013	5.40
2014	5.18

Sumber: BPS DIY (DIY Dalam Angka, tahun 2014), diolah.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa secara umum laju pertumbuhan ekonomi provinsi DIY selama periode 2000-2012 mengalami perubahan yang berfluktuasi namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi DIY mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu dari tahun 2005 yang mencapai 4,73% menjadi 3,69 pada tahun 2006. Penurunan pertumbuhan ini disebabkan oleh musibah gempa bumi yang melanda sebagian wilayah DIY pada akhir bulan mei 2006. Musibah ini cukup signifikan mempengaruhi produktifitas sektor perekonomian DIY, sehingga laju pertumbuhan ekonomi tahun 2006 lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007-2013 perekonomian

DIY kembali menguat dengan laju pertumbuhan mencapai 4,31% hingga 5,40%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013.

Laju pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan laju pertumbuhan penduduk, karena dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan standar hidup masyarakat semakin rendah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang (BPPD DIY, 2014:5). Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam lapangan pekerjaan, karena dengan sumberdaya manusia yang rendah maka semakin banyak tenaga kerja yang tidak terpakai. Perkembangan jumlah tenaga kerja DIY dapat dilihat dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.2

Jumlah Tenaga Kerja Provinsi DIY Tahun 2009-2014 (orang)

Sumber: BPS DIY(DIY Dalam Angka,tahun 2014), diolah.

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah tenaga kerja di DIY berfluktuasi. Jumlah tenaga kerja paling rendah berada pada tahun 2010 sekitar 177.514 orang dan tahun 2011-2012 meningkat menjadi 191.172 orang, pada tahun 2013 menurun dan tahun 2014 meningkat kembali. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2012, persentase penduduk DIY umur 15 tahun ke atas menurut kegiatannya adalah 70,85 persen merupakan angkatan kerja (68,04 persen bekerja dan 2,81 persen pengangguran), sedangkan sisanya sebesar 29,15 persen merupakan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya masing-masing adalah 10,18 persen, 15,03 persen, dan 3,94 persen). Sedangkan berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja bergerak pada sektor pertanian 26,91 persen, perdagangan 24,87 persen, jasa 18,76 persen, industri 15,13 persen dan sisanya 14,34 persen di sektor-sektor lainnya (DIY Dalam Angka,2012 : 62). Pertumbuhan ekonomi yang kurang seimbang baik antar sektor maupun antar golongan akan menimbulkan ketimpangan dalam produktifitas tenaga kerja.

Melihat dari kenyataan bahwa provinsi DIY masih dalam proses pembangunan maka pemerintah daerah melakukan banyak pengeluaran untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran pemerintah tersebut terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom serta bunga dan cicilan hutang. Sedangkan pengeluaran pembangunan terdiri dari pembiayaan rupiah dan bantuan proyek (Tambunan,1996 : 99). Berikut Tabel1.2 pengeluaran rutin pemerintah DIY dari tahun 2009-2012.

Tabel 1.2
Pengeluaran Rutin pemerintah DIY Tahun 2009-2014

Tahun	Pengeluaran Rutin Pemerintah atas dasar harga berlaku (Ribuan Rupiah)	Pengeluaran Rutin Pemerintah atas dasar harga konstan 2000 (Ribuan Rupiah)
2009	1.571.892.164	675.762.935,4
2010	1.630.773.451	687.422.944,4
2011	1.859.142.795	754.430.383,9
2012	2.156.863.309	839.050.536,5
2013	2.454.919.429	944.926.647
2014	3.330.069.350	1.280.205.040

Sumber : BPS DIY(DIY Dalam Angka,tahun 2014), diolah.

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pengeluaran rutin pemerintah Provinsi DIY setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti pada tahun 2009 pengeluaran rutin pemerintah yang dihitung atas dasar harga konstan sekitar Rp 675.762,35 dan pada tahun 2014 mencapai Rp1.280.205.040. Salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah yang pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu dengan adanya sumber-sumber penerimaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang juga merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Indikator penting keberhasilan kemampuan keuangan daerah tercermin dalam kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD) nya untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terkait dengan adanya kebijakan fiskal pemerintah yaitu otonomi daerah, maka baik penerimaan serta pengeluaran lebih

dapat dioptimalkan dengan sebaik mungkin dikarenakan tiap-tiap daerah dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Perkembangan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009 hingga 2014 dapat dilihat melalui Tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3
Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2009-2014.

Tahun	PAD atas dasar harga berlaku (ribu Rupiah)	PAD atas dasar harga konstan 2000 (Ribu Rupiah)
2009	645.145.551	277.350.737,7
2010	740.202.076	312.018.748,1
2011	867.112.885	351.869.855,5
2012	800.156.498	311.272.270,3
2013	1.014.089.544	390.334.697,5
2014	1.233.738.562	474.295.925,7

Sumber : BPS DIY (DIY Dalam Angka, tahun 2014), diolah.

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2009 mencapai Rp 277.350.737,7 hingga 2011 mencapai Rp 351.869.855,5 kecuali pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan dari Rp 351.869.855,5 di tahun 2011 menjadi Rp 311.272.270,3 di tahun 2012, dan tahun 2013-2014 PAD mengalami peningkatan kembali, sehingga dapat dikatakan pendapatan asli daerah DIY mengalami pertumbuhan yang positif. Kenaikan pendapatan asli daerah yang selalu meningkat juga diiringi dengan pengeluaran pemerintah rutin yang meningkat pula, dan dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pemerintah daerah melalui upaya memenuhi kewajiban daerah salah satu tujuannya adalah meningkatkan perekonomian yang diharapkan secara langsung akan berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam penelitian ini ada beberapa

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang akan dikaji lebih dalam yaitu Pendapatan Asli Daerah, pengeluaran pemerintah daerah, dan tenaga kerja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY tahun 1985-2014.
2. Bagaimana Pengaruh pengeluaran pemerintah DIY (belanja rutin pemerintah) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY tahun 1985-2014.
3. Bagaimana Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi DIY tahun 1985-2014.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi DIY tahun 1985-2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi DIY tahun 1985-2014.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi DIY tahun 1985-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil pelaksanaan penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengambilan kebijakan terkait dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi DIY.

2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan metodologi penelitian tentang kajian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi kemajuan pengembangan penelitian.

1.5 Hipotesis

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi DIY tahun 1985-2014.
2. Diduga pengeluaran pemerintah (belanja rutin pemerintah) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi DIY tahun 1985-2014.
3. Diduga tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi DIY tahun 1985-2014.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan sistematika penulisan, yang terdiri dari beberapa bab dengan perinciannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada pendahuluan akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Studi Kepustakaan

Pada bagian ini akan disampaikan tentang landasan teori yang relevan digunakan dalam analisis hasil penelitian serta kajian penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian

Dalam metode penelitian akan dibahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, model penelitian, dan alat analisis yang digunakan untuk mengolah data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan mendeskripsikan hasil penelitian meliputi deskripsi data yang diteliti, hasil pengolahan data serta pembahasan.

Bab V Penutup

Bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran yang relevan, sebagai masukan yang sifatnya membangun bagi pihak-pihak yang terkait.